



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APIP TAHUN 2021

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
JI. PEMUDA NO. 127-133 SEMARANG
Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 fax.(024) 3514351
Semarang 50132

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2021. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Tahun 2021 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar ini disusun dengan harapan:

- a. Memberikan informasi perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Memberikan informasi kegiatan pengawasan dan sebagai referensi dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat dan terimakasih.

Semarang, Januari 2022

Pit. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Kebijakan Strategis.....	4
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan.....	10
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya.....	10
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	15
A. Audit/Pengawasan.....	15
1. Audit Kinerja.....	15
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).....	19
B. Reviu.....	21
C. Pemantauan.....	30
D. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	32
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	38
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	38
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP...	43

BAB IV	HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	46
A.	Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	47
B.	Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota	47
BAB V	SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	49
A.	Simpulan.....	49
B.	Hambatan.....	50
C.	Rekomendasi.....	51
LAMPIRAN 1	52
LAMPIRAN 2	59
LAMPIRAN 3	63
LAMPIRAN 4	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data ASN Berdasarkan Jabatan.....	7
Tabel 2	Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	9
Tabel 3	Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya....	14
Tabel 4	Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	16
Tabel 5	Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	18
Tabel 6	Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	20
Tabel 7	Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Tahun 2021	20
Tabel 8	Aduan Masyarakat yang Ditangani oleh APH Tahun 2021.....	21
Tabel 9	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	28
Tabel 10	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP.....	37
Tabel 11	Status Tindak Lanjut LHP BPK-RI	39
Tabel 12	Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	44
Tabel 13	Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	4
Gambar 2	Data ASN Berdasarkan Golongan.....	7
Gambar 3	Data ASN Berdasarkan Pendidikan.....	8

BAB I INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

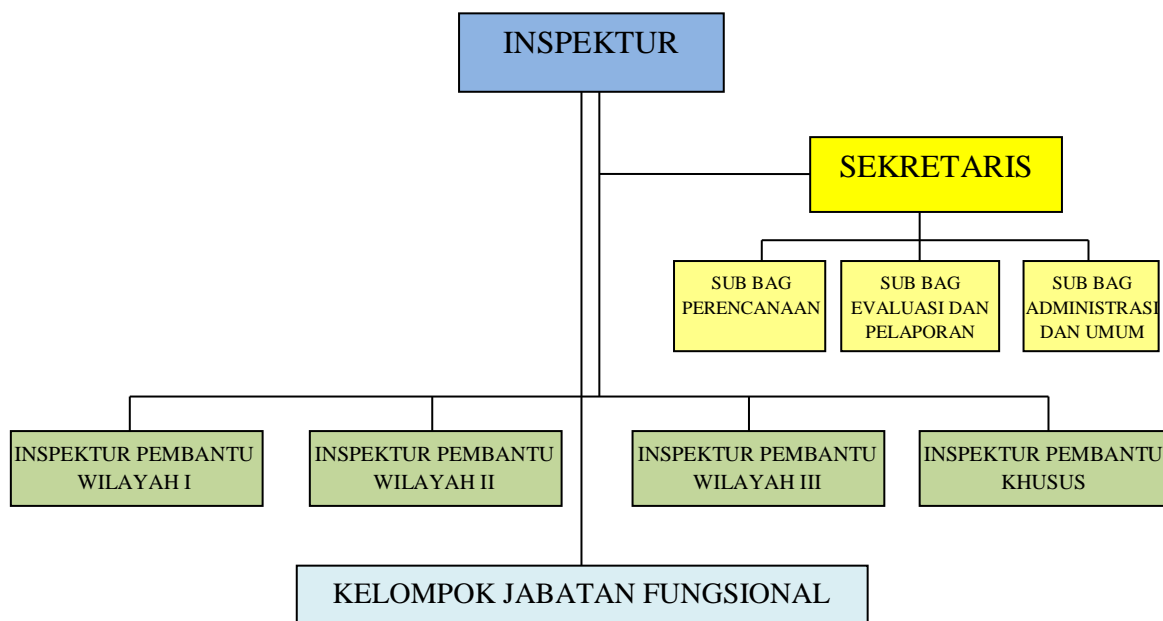
Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:
- a. Plt. Inspektur : DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
 - b. Sekretaris : NUR ROHMAT, S.Sos., M.Si.
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum: SRI RAHAYUNINGSIH, S.E., M.M.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan: M. YUSDI NOVIADI, S.T., M.B.A.
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: BAGUS PANUNTUN, S.STP., M.A.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I: Drs. ATN TRIHANANTO
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II: SOEMARIJONO, S.E., M.Si.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III: RATNA LUHUNG T., S.E., M.M.
 - f. Inspektur Pembantu Khusus: DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Auditor;
 - 2) Auditor Kepegawaian; dan
 - 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Gambar 1
Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



C. Kebijakan Strategis

1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan *tagline* “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi kedua yaitu: “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang bebas dari korupsi. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 yaitu:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- 2) Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dibutuhkan beberapa strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- 1) Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- 2) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- 3) Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- 4) Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- 7) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dibutuhkan kebijakan-kebijakan internal.

Arah kebijakan pengawasan tahun 2021, yaitu:

- 1) Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- 3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Level Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada elemen:
 - Peran dan Layanan (elemen 1);
 - Praktik Profesional (elemen 3); dan
 - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
- 2) Nilai Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,19.

Guna mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh:

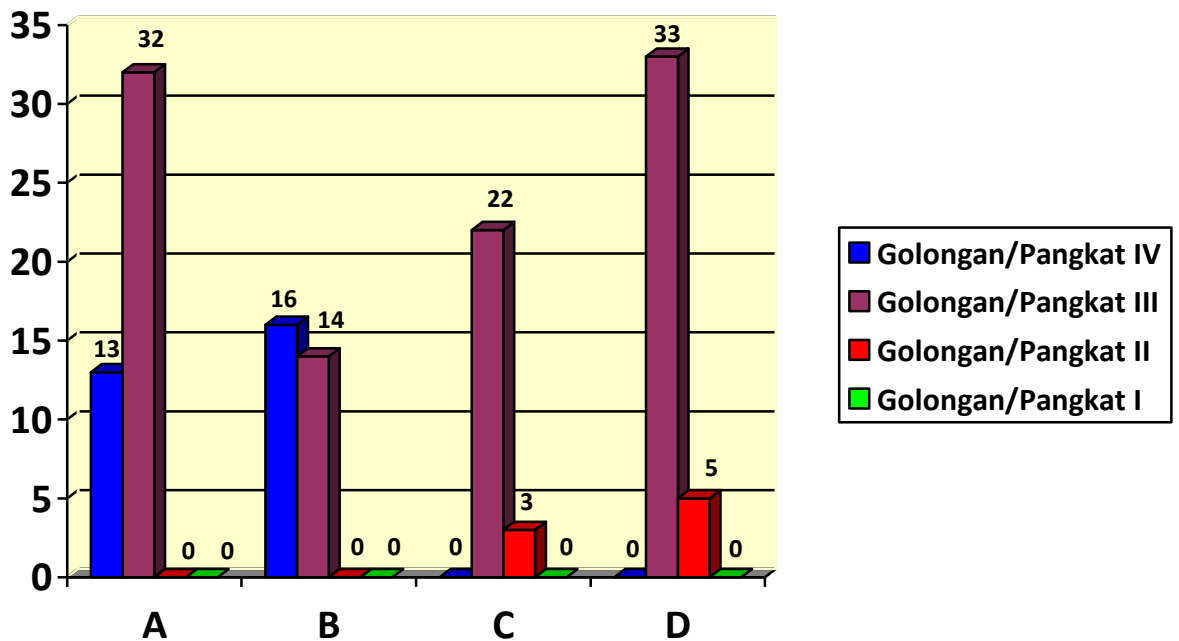
a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Kondisi ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

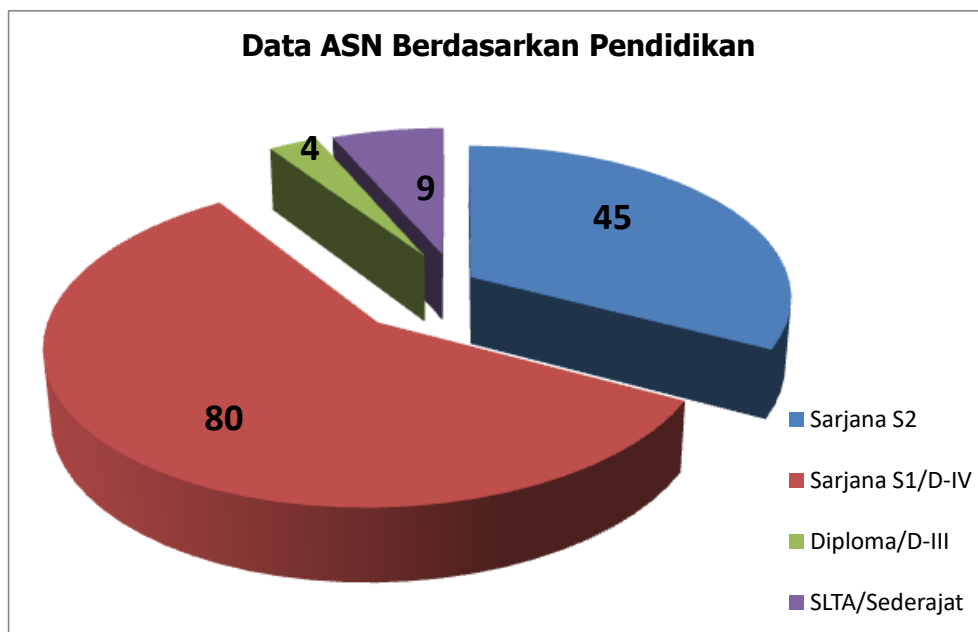
Tabel 1
Data ASN Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL				FUNGSIONAL						JUMLAH
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	KHUSUS			UMUM			
				Auditor	PPUPD	Audiwan	Sekretariat	Pengolah Data	TU Bidang	
-	-	5	3	38	23	2	62	1	4	138

Gambar 2
Data ASN Berdasarkan Golongan



Gambar 3



Seperti yang terdapat dalam Gambar 1 dan Gambar 2, dari 138 jumlah ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, tidak ada ASN dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/a dan II/b, serta golongan/pangkat IV/c dan IV/d. Adapun golongan/pangkat II/c sebanyak 3 orang, golongan/pangkat II/d sebanyak 5 orang, golongan/pangkat III/a sebanyak 32 orang, golongan III/b sebanyak 14 orang, golongan/pangkat III/c sebanyak 22 orang, golongan/pangkat III/d sebanyak 33 orang, golongan/pangkat IV/a sebanyak 13 orang, dan golongan/pangkat IV/b sebanyak 16 orang. Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat Sarjana S2 sebanyak 45 orang, Sarjana S1/D-IV sebanyak 80 orang, Diploma/D-III sebanyak 4 orang, dan SLTA (Sederajat) sebanyak 9 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2
Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.519	12.485.050.439
	- Alat Besar	6	169.042.000
	- Alat Angkutan	33	4.205.343.456
	- Alat Bengkel dan Ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	992	4.708.561.400
	- Alat Studio Komunikasi Pemancar	103	982.658.165
	- Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	346	2.217.523.418
3.	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	181	21.073.000
	- Bahan Perpustakaan	180	19.073.000
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.704	25.646.008.889

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Tahun 2021 ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021;
- b. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
- c. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
- d. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan pengawasan tersebut antara lain meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:
 - 1) Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - 3) Reviu Laporan Keuangan;
 - 4) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 7) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - 8) Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan;
 - 9) Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur;
 - 10) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); dan
 - 11) Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui:
 - 1) Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan:
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
 - c) Pembangunan Zona Integritas;

- d) Pengendalian gratifikasi;
 - e) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - g) Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - h) Penanganan benturan kepentingan; dan
 - i) Penguatan APIP.
- 2) Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; dan
 - 3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Kegiatan penunjang pengawasan meliputi:
- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - 2) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - 3) Koordinasi program pengawasan; dan
 - 4) Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.
- d. Pemantauan verifikasi pelaporan capaian aksi pencegahan pemberantasan korupsi pemerintah daerah.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan terhadap urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada:

- 1) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
- 2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
- 3) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
- 4) Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
- 5) Penyelesaian batas daerah.

3. Kegiatan Pengawasan Umum di Kabupaten/Kota yang Difokuskan pada:

- a. Pelayanan publik di daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan penduduk serta pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- c. Kerjasama daerah, yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah serta kerjasama daerah dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Daerah atau *stakeholder* lain.

4. Kegiatan Penunjang Pembinaan dan Pengawasan:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- c. Koordinasi program pengawasan; dan
- d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Tabel 3
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT Tahun 2021

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah OP	Jumlah Dana	Jumlah OP	Jumlah Dana
A.	Audit	245	3.658.491.000	249	3.609.318.008
	- Kinerja	30	1.274.955.000	30	1.255.565.169
	- ADTT	114	1.995.184.000	121	1.975.576.959
	- Reviu	101	388.352.000	98	378.175.880
B.	Evaluasi Kinerja	84	598.300.000	83	595.946.034
C.	Pemantauan	84	440.040.000	84	435.657.469
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	84	440.040.000	84	435.657.469
D.	Kegiatan Pengawasan Lainnya	1	17.295.000	4	9.697.000
	Jumlah	414	4.714.126.000	420	4.650.618.511

Keterangan:

- a. OP : Objek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- c. ADTT: Audit dengan Tujuan Tertentu

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan telah dilaksanakan 1 (satu) kali Bimbingan Teknis (Bimtek) dan 2 (dua) kali Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Selain itu juga terdapat 55 (lima puluh lima) pengiriman Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan/*Workshop*/Sosialisasi di sepanjang tahun 2021 ini.

Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Audit/Pengawasan

1. Audit Kinerja

Dalam pelaksanaan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan tiap tahun (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021).

Pada tahun 2021 jumlah dan jenis temuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 747 temuan dan 1.217 rekomendasi dengan nilai potensi kerugian daerah sebesar Rp1.486.274.812,00 sebagai berikut:

Tabel 4
Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp)
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan		1	332	44,44	1.486.274.812,00
1	Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01	73	9,77	981.303.905,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02	3	0,40	2.979.138,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03	23	3,08	501.591.769,00
4	Administrasi	1.04	233	31,19	400.000,00
5	Indikasi tindak pidana	1.05	0	0	0

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp)
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	351	46,99	0,00
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01	99	13,25	0,00
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02	134	17,94	0,00
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03	118	15,80	0,00
Temuan 3 E		3	64	8,57	0,00
1	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01	5	0,67	0,00
2	Ketidakefisienan	3.02	11	1,47	0,00
3	Ketidakefektifan	3.03	48	6,43	0,00
Jumlah Kejadian/Temuan			747	100%	1.486.274.812,00

Tabel 4 di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Terbanyak adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebesar 46,99%, kemudian Ketidapatuhan terhadap Peraturan dengan persentase sebesar 44,44% dan terakhir temuan 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien) sebesar 8,57%. Oleh karena itu, fungsi pembinaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat menjadi penting dan wajib untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah sehingga dapat menekan terjadinya temuan berulang pada tahun selanjutnya.

Terhadap 747 temuan di atas, Inspektorat telah memberikan 1.217 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjutnya.

Rekomendasi sendiri dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

NO	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai Temuan (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.	78	6,41	1.322.947.562,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	53	4,35	51.441.862,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	2	0,16	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	357	29,33	10.539.138,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	275	22,60	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	35	2,88	0
8	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung sistem pengendali	1	0,08	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	364	29,91	101.346.250,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.	8	0,66	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang.	4	0,33	0

NO	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai Temuan (Rp)
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.	3	0,25	0
13	Pelaksanaan Sosialisasi	37	3,04	0
14	Lain-lain	0	0	0
Jumlah		1.217	100,00	1.486.274.812,00

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa jenis rekomendasi yang paling sering diberikan adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sejumlah 364 rekomendasi atau 29,91%. Sedangkan pengelompokan menurut nilai temuan maka rekomendasi penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat sebesar Rp1.322.947.562,00.

2. Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Pelaksanaan ADTT sampai dengan tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Bantuan Desa sebanyak 5 (lima) kali yaitu Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa (Bandes) pada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Karanganyar;
2. *Probitiy audit* sebanyak 5 (lima) pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
3. Pendapatan asli daerah sebanyak 14 (empat belas) pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan;

4. Vaksinasi Covid-19 sebanyak 1 (satu) pada Dinas Kesehatan;
5. Pengelolaan barang milik daerah sebanyak 1 (satu) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
6. Pengelolaan pendapatan sebanyak 4 (empat) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Realisasi audit dengan tujuan tertentu sampai dengan tahun 2021 sebagaimana dalam Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Tahun 2021

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1.	Bandes	5	5
2.	<i>Probit Audit</i>	5	5
3.	Pendapatan Asli Daerah	14	14
4.	Vaksinasi Covid-19	1	1
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1
6.	Pengelolaan Pendapatan	4	4
Jumlah		30	30

Tabel 7
Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus	87
Jumlah Pemeriksaan Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	57
% Pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	65,51

Hasil pemeriksaan kasus yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdapat 57 kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), yang terdiri dari 27 kasus korupsi dan 30 kasus pungutan liar, dengan persentase masing-masing sebesar 31,03% dan 34,48%. Dari jumlah kasus tersebut terdapat 16 kasus yang dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Aduan Masyarakat yang Ditangani oleh APH Tahun 2021

Instansi Penyidik	Kasus	Potensi Kerugian Negara	
		Rupiah	Valas
Kepolisian	16	0	0
Kejaksaan	0	0	0
KPK	0	0	0
Jumlah	16	0	0

B. Reviu

Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran *watch dog* (sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat *preventive* (pencegahan), *consultative*, dan *quality assurance*, pada program-program strategis, yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning systems*, pendampingan, dan pembinaan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seyogyanya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, resiko, dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran APIP tersebut salah satunya melalui kegiatan reviu yang pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali, yaitu:

1. Reviu PMPRB Tahun 2021

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu PMPRB pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah disajikan dengan data dukung yang akurat, andal, dan valid.

2. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam

rancangan LPPD. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu terhadap LPPD Provinsi Jawa Tengah sebelum ditandatangani Gubernur sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/109/TU/2021 tanggal 15 Maret 2021.

3. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ

Tujuan reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial pada APBN/D per triwulan, mengetahui jumlah atau posisi Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir triwulan tahun pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sasaran reviu yaitu jumlah anggaran dan realisasi per triwulan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial pada APBN/D di masing-masing K/L/P. Ruang lingkup reviu adalah meliputi realisasi anggaran (Penyerapan Anggaran) triwulanan atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial; dan Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) triwulanan yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui pelelangan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah setiap triwulan tahun berjalan melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan melaporkan kepada *stakeholder* terkait.

4. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Reviu Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Peran ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan yang menegaskan bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 700/3153/SJ tanggal 27 Mei 2021 tentang Reviu APIP atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu atas dokumen:

- 1) RKPD Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2022 untuk seluruh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- 3) RKPD Perubahan Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan Tahun 2021 untuk seluruh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- 5) KUA PPAS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; dan
- 6) KUA PPAS Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

5. Reviu DAK Fisik

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2021 dibidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Kesehatan,

Bidang Pendidikan, Bidang Pariwisata, Bidang Jalan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Reviu dilakukan di 10 Perangkat Daerah, yakni:

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g) Dinas Kerasipan dan Perpustakaan;
- h) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; dan
- j) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta.

6. Reviu Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Covid-19

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Penanganan Dampak Covid-19 pada:

- a) Dinas Sosial;
- b) Dinas Koperasi dan UKM;
- c) Dinas Perhubungan;
- d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; dan
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Reviu PBJ pada kegiatan Pengadaan Sarana untuk Dukungan

Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Vaksin pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

b) Reviu PBJ pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

8. Reviu Implementasi Standar Satuan Harga (SSH)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Implementasi Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Reviu Implementasi ASB dan HSPK Tahun 2021

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

10. Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021.

11. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan hasil opini LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini WDP pertama kali di tahun 2011, opini WTP-DPP sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2016-2020 sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas prestasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan yang disampaikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 secara virtual. Adapun pergerakan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 9
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

TAHUN	OPINI BPK-RI
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

12. Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu ini dilakukan tanggal 2 September 2021.

13. Reviu atas Pengajuan Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2021

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu pada Bidang Jalan serta Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan juga di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 Juni 2021.

14. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan 2 (dua) kali Reviu RKPD yaitu Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Reviu ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 dan juga 16 Agustus 2021.

15. Reviu Anggaran yang bersumber dari Anggaran BLUD

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Reviu ini dilakukan tanggal 13 Agustus 2021.

16. Reviu Kegiatan yang bersumber dari Anggaran DBHCHT

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Reviu ini dilakukan tanggal 13 Agustus 2021.

17. Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Reviu ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021.

18. Reviu KUA dan PPAS Tahun 2022

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Reviu ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

C. Pemantauan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan berupa:

1. Monitoring Bantuan Sosial

Inspektorat melakukan Monitoring Pendistribusian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan PPKM di Lingkungan Jawa Tengah pada:

- a) Dinas Sosial;
- b) Dinas Perhubungan;
- c) Dinas Koperasi dan UKM;
- d) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Monitoring Bantuan Keuangan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Monitoring Transfer Dana Desa (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 pada:

- a) Kabupaten Karanganyar;
- b) Kabupaten Boyolali;
- c) Kabupaten Pati;
- d) Kabupaten Brebes; dan
- e) Kabupaten Purbalingga.

3. Monitoring Bantuan Swakelola

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring bantuan swakelola sebanyak 1 (satu) kali pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Monitoring Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2021

Memperhatikan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: S-533/D2/05/2021 tanggal 14 Juli 2021 Hal: Pengadaan ASN Formasi Tahun 2021 dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 700/1470/IJ Hal: Pengawasan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2021 oleh APIP Daerah, bahwa APIP Daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan PPPK Guru di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan menggunakan pedoman dan manual *user* aplikasi ASN 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah turut serta melakukan pengawasan pengadaan CPNS Formasi tahun 2021.

5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan untuk memetakan pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Monitoring Pelayanan di Samsat

Inspektorat dan Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah melakukan Monitoring Pelayanan di Samsat Kabupaten Temanggung, Samsat Kabupaten Magelang dan Samsat Kota Magelang.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, antara lain kegiatan Bimbingan Teknis sebanyak 1 (satu) kali yaitu Bimbingan Teknis Penulisan Audit Report dan Karya Ilmiah yang Berkualitas (30 s.d 31 Maret 2021) dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 2 (dua) kali yaitu PKS Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (12 April 2021) dan PKS Penggunaan Aplikasi Sibijak (4 Mei 2021). Terdapat pula 55 (lima puluh lima) pengiriman Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan/*Workshop*/Sosialisasi terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan, LHKPN, Bimbingan Teknis Bendahara Daerah secara virtual, Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama, dan Sertifikasi Manajemen Resiko.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik, Inspektorat mengemban tugas yang sudah ditentukan dalam Pengendalian Gratifikasi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-

PPK), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengendalian Gratifikasi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ada Tim Program Pengendalian Gratifikasi pada seluruh Perangkat Daerah sehingga diharapkan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), selain itu juga dilaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah. Pada tahun 2021 terdapat 33 laporan dengan nilai finansial Rp18.357.300,00.

Pelaporan LHKPN, merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN. Pada akhir tahun 2021 jumlah Wajib Laport yang sudah melaporkan sebanyak 2.320 orang dari 2.320 orang (100%). Dapat dilaporkan pula bahwa seluruh Wajib **LHKASN** sebanyak 38.198 orang telah melapor harta kekayaannya (100%).

Evaluasi RB, merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit

(Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik). Hasil evaluasi RB tahun 2020 oleh Kemenpan dan RB Provinsi Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,05 atau predikat "BB".

Evaluasi SAKIP, yang dilaksanakan oleh Kemenpan dan RB untuk SAKIP Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 80,25 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Pembangunan Zona Integritas (ZI), telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Langkah selanjutnya telah dilakukan penilaian pada beberapa SKPD/Unit Kerja. Pada tahun 2018 tidak ada SKPD yang memenuhi kriteria dalam hal survei kepuasan masyarakat yang merupakan indikator dalam pengusulan SKPD berpredikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) SKPD yang memperoleh predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Margono Soekarjo. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) SKPD yang

memperoleh predikat dari Kemenpan dan RB, 2 (dua) predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Tugurejo serta 2 (dua) predikat WBK yaitu DPMPTSP dan DLHK Wilayah I. Sementara itu perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021 telah diraih oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit yaitu Balatkop (Balai Pelatihan Koperasi dan UKM) Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) Surakarta.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQA-299/PW11/3.1/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Laporan Penjamin Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hasil penjaminan kualitas menunjukkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai skor 2,875. Dengan demikian, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai Level 2 (berkembang). Capaian ini turun dari hasil penilaian SPIP sebelumnya sebesar 3,158 yang berada pada Level 3 (terdefinisi). Di tahun 2021, Inspektorat telah melakukan pendampingan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi pada 16 SKPD sampel dan melaksanakan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2021 s.d. 3 Desember 2021 dengan hasil penjaminan kualitas berupa nilai maturitas SPIP Terintegrasi 3,95.

Kapabilitas APIP, perlu ditingkatkan pelaksanaannya oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019 dan ditargetkan juga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Hasil *quality assurance* BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu dari “Level 2 Dengan Catatan” pada tahun 2016 menjadi “Level 3 Dengan Catatan” pada tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP, sehingga Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai Level 3 Penuh pada tahun 2019. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator kinerja pada sasaran Kapabilitas APIP masih menggunakan penilaian tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilakukan asesmen dari BPKP terkait penilainan level tersebut. Sehingga untuk capaian pada tahun 2021 yang digunakan capaian tahun 2019 sebesar Level 3 Penuh. Diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*) atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah berada pada Level 3 Penuh untuk semua elemen, seperti yang terdapat pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui APIP dalam penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti. Hal tersebut antara lain disebabkan terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit ditindak lanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Pada tahun 2021 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Pembahasan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan yaitu pada bulan Juni dan Desember 2021. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d. tahun 2021 sebanyak 54 LHP dengan jumlah temuan dari tahun 2005 s.d. tahun 2021 sebanyak 732 temuan dan 1.727 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK-RI sebagai berikut:

Tabel 11
Status Tindak Lanjut LHP BPK-RI
Tahun 2005 s.d. 2021

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	LKPD Tahun 2020	10	20	1	19	0	0
2	Kinerja Permodalan 2020	11	33	31	2	0	0
3	Kinerja SPBE 2019-2020	13	34	17	17	0	0
4	Kepatuhan Penanganan Covid-19	9	15	15	0	0	0
5	Kinerja Bank Jateng 2020	12	74	28	46	0	0
6	Investasi SPHC	8	19	9	10	0	0
7	LKPD Tahun 2019	14	54	14	40	0	0
8	Indeks Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018	6	31	15	16	0	0
9	PDTT atas Operasional BPD Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019	6	8	4	4	0	0
10	LKPD Tahun 2018	23	43	22	21	0	0
11	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana TA 2017 dan 2018 (semester I)	17	49	42	7	0	0
12	LKPD Tahun 2017	26	58	37	21	0	0
13	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14	39	6	33	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
14	LKPD Tahun 2016	18	32	25	7	0	0
15	Kinerja Tata Kelola Pemda dalam Pembinaan BUMD TA 2011-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	10	34	22	12	0	0
16	Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	11	44	43	1	0	0
17	PNPM Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	11	12	12	0	0	0
18	LKPD TA 2015	28	73	65	8	0	0
19	Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. 2015	6	10	6	4	0	0
20	Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Prov.Jateng	8	21	21	0	0	0
21	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	5	17	17	0	0	0
22	Kinerja Efektifitas Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	6	14	12	2	0	0
23	LKPD TA 2014	33	108	91	17	0	0
24	Kinerja Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo TA 2013 dan 2014	17	28	28	0	0	0
25	Operasional PT BPD Jateng TA 2013-2014	32	66	57	9	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
26	LKPD TA 2013	21	62	57	5	0	0
27	Operasional Pilkada Thn 2013 pada KPU dan Bawaslu Jawa Tengah	17	47	47	0	0	0
28	Kinerja APIP Thn 2012	25	52	52	0	0	0
29	LKPD TA 2012	13	29	29	0	0	0
30	Operasional PT BPD Jateng TB 2011-2012	18	38	33	5	0	0
31	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA. 2012	8	13	12	1	0	0
32	LKPD TA 2011	18	40	35	5	0	0
33	Kinerja RSUD dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah TA 2010-2011	12	21	21	0	0	0
34	Belanja Provinsi Jateng TA 2010-2011	12	29	29	0	0	0
35	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010	9	55	20	35	0	0
36	Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 - 2012	11	14	14	0	0	0
37	LKPD TA 2010	12	26	26	0	0	0
38	Operasional BPD Jateng TA 2010	11	23	22	1	0	0
39	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2009 dan 2010	14	27	26	1	0	0
40	LKPD TA 2009	11	20	19	1	0	0
41	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	5	11	11	0	0	0
42	LKPD TA 2008	17	35	32	3	0	0
43	Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008	7	13	5	8	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
44	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008 Pada Pemprov Jateng	13	25	25	0	0	0
45	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008 Pada Kanwil Departemen Agama Prov. Jateng	19	39	0	0	0	39
46	Operasional BPD Jateng TB 2007 dan 2008	19	32	32	0	0	0
47	LKPD TA 2007	20	40	40	0	0	0
48	Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2007 dan Smt I 2007	3	4	4	0	0	0
49	LKPD TA 2006	20	43	43	0	0	0
50	Perusda Provinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA 2005-2006	13	20	20	0	0	0
51	LKPD TA 2005	19	28	28	0	0	0
52	Kinerja BPD Jateng TB 2004	16	25	25	0	0	0
53	Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2004 dan 2005	8	12	12	0	0	0
54	LKPD TA 2004	6	7	7	0	0	0
	TOTAL	732	1.727	1.366	361	0	39

**Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1*

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Data hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan mulai tahun 2014 menggunakan *database* yang tersimpan pada aplikasi SIMWAS sedangkan tahun 2007 s.d. 2013 masih menggunakan data manual. Sampai dengan tahun 2021, masih terdapat temuan sebanyak 25.520 dengan 32.879 rekomendasi. Status temuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. 24.447 temuan dengan 31.227 rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
- b. 543 temuan dengan 887 rekomendasi dalam proses tindak lanjut; dan
- c. 530 temuan dengan 765 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Rincian temuan dan rekomendasi tersebut berdasarkan tahun pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 s.d. 2021

No	Tahun	Jumlah Temuan / Status				Jumlah Rekomendasi / Status			
		Σ	S	D	B	Σ	S	D	B
1	2021	747	333	100	314	1.217	512	211	494
2	2020	775	690	34	51	1.019	920	45	54
3	2019	1.530	1.410	76	44	2.053	1.877	102	74
4	2018	1.641	1.522	44	75	2.371	2.222	65	84
5	2017	1.168	1.150	18	0	1.789	1.749	40	0
6	2016	2.115	2.057	58	0	2.864	2.754	110	0
7	2015	2.260	2.215	44	1	3.100	3.014	85	1
8	2014	1.818	1.758	40	20	2.530	2.419	86	25
9	2013 s/d 2007	13.466	13.312	129	25	15.936	15.760	143	33
	Jumlah	25.520	24.447	543	530	32.879	31.227	887	765

**Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2*

Keterangan:

Σ = jumlah temuan/rekomendasi

S = selesai ditindaklanjuti

D = dalam proses tindak lanjut

B = belum ditindaklanjuti

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada bulan April 2021 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki

Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan menghasilkan 2 temuan dan 4 rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 terdapat 176 temuan dengan 249 rekomendasi, dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Adapun status temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Lampiran 3.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limpahan atau yang diterima dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Sepanjang tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 87 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 21, Laporan Gubernur sebanyak 42, media sosial sebanyak 13, limpahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3, limpahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 1, limpahan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 3, dan limpahan Gubernur sebanyak 4. Rincian tercantum dalam Lampiran 4.

Penanganan aduan masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 44, ke APH 16, dilimpahkan ke SKPD sebanyak 6, pengaduan diarsipkan sebanyak 5 dan pengaduan yang dikonfirmasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.

A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 12 kasus dengan perincian yaitu telah ditindaklanjuti sebanyak 12 aduan dengan hasil 4 aduan terbukti, 6 aduan tidak terbukti, dan 2 aduan dengan keterangan. Aduan dengan keterangan artinya hasil pemeriksaan terhadap aduan tersebut hanya berupa klarifikasi, sehingga tidak dapat disimpulkan terbukti atau tidak terbukti, contohnya aduan masyarakat terkait permintaan bantuan.

B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 44 aduan. Dari 44 aduan tersebut 4 aduan dinyatakan terbukti, 12 aduan tidak terbukti, 5 aduan dengan keterangan, 22 aduan masih dalam proses tindak lanjut, dan 1 aduan belum ditindak lanjuti. Rincian selengkapnya dapat disimak pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13
Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Aduan Dilimpahkan	T	TT	KET	D	B
1.	Kabupaten Grobogan	2	0	2	0	0	0
2.	Kabupaten Banyumas	6	0	2	1	3	0
3.	Kabupaten Brebes	4	0	2	0	2	0
4.	Kabupaten Demak	4	0	0	0	4	0
5.	Kabupaten Jepara	1	0	0	0	1	0
6.	Kabupaten Kendal	2	1	0	0	1	0
7.	Kabupaten Pati	1	0	1	0	0	0

No.	Kabupaten/Kota	Aduan Dilimpahkan	T	TT	KET	D	B
8.	Kabupaten Pemalang	1	1	0	0	0	0
9.	Kabupaten Karanganyar	2	0	0	0	2	0
10.	Kabupaten Magelang	3	0	1	2	0	0
11.	Kabupaten Kebumen	3	0	0	1	2	0
12.	Kabupaten Tegal	2	1	1	0	0	0
13.	Kabupaten Blora	1	0	0	0	1	0
14.	Kabupaten Banjarnegara	2	0	2	0	0	0
15.	Kabupaten Rembang	1	0	0	0	0	1
16.	Kabupaten Wonosobo	1	0	0	1	0	0
17.	Kabupaten Purworejo	2	0	0	0	2	0
18.	Kabupaten Semarang	1	0	0	0	1	0
19.	Kabupaten Cilacap	2	1	0	0	1	0
20.	Kabupaten Batang	1	0	0	0	1	0
21.	Kota Semarang	1	0	1	0	0	0
22.	Kabupaten Sukoharjo	1	0	0	0	1	0
Jumlah		44	4	12	5	22	1

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 747 temuan yang meliputi Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan sebanyak 332 (44,44%), Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 351 (46,99%) dan Temuan 3E sebanyak 64 (8,57%) dan menghasilkan total 1.217 rekomendasi. Status tindak lanjut yang dinyatakan selesai sebanyak 333, dalam proses sebanyak 100, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 314.
3. Pada tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 87 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 21, Laporan Gubernur sebanyak 42, Media Sosial sebanyak 13, limpahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 1, Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 3, dan limpahan Gubernur sebanyak 4.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP, terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya sampai dengan tahun 2021 yaitu :
 - a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.366 rekomendasi yang telah selesai (79,10%), dan 361 rekomendasi dalam proses tindak lanjut (20,90%).

- b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2021 terdapat 512 rekomendasi yang telah selesai, 211 rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan 494 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- c. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 terdapat 178 temuan dengan 253 rekomendasi. Dari status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 176 temuan dan 249 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

B.Hambatan

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diluar tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah.
4. Belum terdapat bukti pendukung telah dilakukan evaluasi berkala terkait kebijakan/SOP dan implementasi atas subunsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Penilaian Risiko, dan Kegiatan Pengendalian, yang seluruh unsur-unsur tersebut berkaitan dengan SPIP.

C. Rekomendasi

1. Perlu dibuat kebijakan terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Auditi.
2. Meningkatkan bimbingan teknis pengawasan terutama audit kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
4. Melakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan antara lain:
 - a) Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko, struktur pengelolaan risiko, dan mengintegrasikan proses pengelolaan risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah;
 - b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan risiko; dan
 - c) Melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko pada seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat beserta informasi/simpulan yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya didokumentasikan dengan baik.
6. Memperbaiki substansi atas penjelasan pemenuhan bukti pendukung maturitas penyelenggaraan SPIP pada level yang ditetapkan dalam laporan hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dan skor tingkat maturitas dalam laporan *self-assesment* sesuai hasil penjaminan kualitas.

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
TAHUN 2005 S.D. 2021**

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tahun Pemeriksaan 2021													
a	LKPD Tahun 2020	10	81,778,099,014.49	20	145,164,141.49	1	0	19	145,164,141.49	0	0	0	0	
b	Kinerja Permodalan Tahun 2020	11	0	33	0	31	0	2	0	0	0	0	0	
	Jumlah Th. 2021	21	81,778,099,014.49	53	145,164,141.49	32	0	21	145,164,141.49	0	0	0	0	
2	Tahun Pemeriksaan 2020													
a	LKPD Tahun 2019	14	943,002,341.33	54	943,002,341.33	14	250,889,226.13	40	692,133,115.20	0	0	0	0	
b	Kinerja SPBE 2019-2020	13	0	34	0	17	0	17	0	0	0	0	0	
c	Kepatuhan Penanganan Covid-19	9	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
d	Kinerja Bank Jateng 2020	12	0	74	0	28	0	46	0	0	0	0	0	
e	Investasi SPHC 2020	8	5,299,632,999.00	19	5,299,632,999.00	9	89,800,000	10	4,314,632,999	0	0	0	0	
	Jumlah Th. 2020	56	6,242,635,340.33	196	6.242,635,340.33	83	340,689,226.13	113	5,006,766,114.20	0	0	0	0	
3	Tahun Pemeriksaan 2019													
a	LKPD Tahun 2018	23	4,760,376,658.29	43	4,760,376,658.29	22	2,175,588,142.73	21	2,584,788,515.56	0	0	0	0	
b	Indek Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018	6	0	31	0	15	0	16	0	0	0	0	0	

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Th. 2019	29	4,760,376,658.29	74	4,760,376,658.29	37	2,175,588,142.73	37	2,584,788,515.56	0	0	0	0
4	Tahun Pemeriksaan 2018												
a	LKPD Tahun 2017	26	4,352,135,169.97	58	3,942,862,764.97	37	3,616,697,272.30	21	326,165,492.67	0	0	0	0
b	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana TA 2017 dan 2018 (semester I)	17	0	49	0	42	0	7	0	0	0	0	0
c	PDTT atas Oprasional BPD Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019	6	0	8	0	4	0	4	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2018	49	4,352,135,169.97	115	3,942,862,764.97	83	3,616,697,272.30	32	326,165,492.67	0	0	0	0
5	Tahun Pemeriksaan 2017												
a	LKPD Tahun 2016	18	2,397,949,613.20	32	2,397,949,613.20	25	2,397,949,613.20	7	0	0	0	0	0
b	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14	0	39	0	6	0	33	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2017	32	2,397,949,613.20	71	2,397,949,613.20	31	2,397,949,613.20	40	0	0	0	0	0
6	Tahun Pemeriksaan 2016												
a	LKPD TA 2015	28	2,735,813,152.30	73	3,715,689,152.30	65	772,884,052.30	8	1,962,929,100.00	0	0	0	0
b	Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. 2015 *)	6	0	10	0	6	0	4	0	0	0	0	0
c	Kinerja Tata Kelola Pemda dalam Pembinaan BUMD TA 2011-2016 pada	10	0	34	0	22	0	12	0	0	0	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pemprov Jawa Tengah													
d	Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	11	0	44	0	43	0	1	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2016	55	2,735,813,152.30	161	3,715,689,152.30	134	772,884,052.30	25	1,962,929,100.00	0	0	0	0	0
7	Tahun Pemeriksaan 2015													
a	LKPD TA 2014	33	4,135,352,824.74	108	663,073,923.46	91	507,161,022.76	17	155,912,900.70	0	0	0	0	0
b	Kinerja Efektifitas Implementasi SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	6	0	14	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0
c	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	5	1,984,580,167.03	17	1,984,580,167.03	17	1,984,580,167.03	0	0	0	0	0	0	0
d	Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	8	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahun 2015	52	6,119,932,991.77	160	2,647,654,090.49	141	2,491,741,189.79	19	155,912,900.70	0	0	0	0	0
8	Tahun Pemeriksaan 2014													
a	LKPD TA 2013	21	1,042,532,185.53	62	1,042,532,185.53	57	1,042,532,185.53	5	0	0	0	0	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Kinerja Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo TA 2013 dan 2014	17	5,272,720,017.51	28	288,152,868.94	28	288,152,868.94	0	0	0	0	0	0
c	Operasional PT BPD Jateng TA 2013-2014	32	179,162,421,902.11	66	132,096,321,048.45	57	84,726,582,838.85	9	47,369,738,209.60	0	0	0	0
Jumlah Th. 2014		70	185,477,674,105.15	156	133,427,006,102.92	142	86,057,267,893.32	14	47,369,738,209.60	0	0	0	0
9	Tahun Pemeriksaan 2013												
a	Operasional Pilkada Thn 2013 pada KPU dan Bawaslu Jawa Tengah	17	1,032,316,397.00	47	1,014,144,497.00	47	1,014,144,497.00	0	0	0	0	0	0
b	Kinerja APIP Thn 2012	25	0	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0
c	LKPD TA 2012	13	524,818,000.00	29	524,818,000.00	29	524,818,000.00	0	0	0	0	0	0
d	Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 - 2012	11	142,379,513.73	14	142,379,513.73	14	142,379,513.73	0	0	0	0	0	0
Jumlah Th. 2013		66	1,699,513,910.73	142	1,681,342,010.73	142	1,681,342,010.73	0	0	0	0	0	0
10	Tahun Pemeriksaan 2012												
a	LKPD TA 2011	18	2,335,147,801.00	40	1,987,891,611.00	35	1,987,891,611.00	5	0	0	0	0	0
b	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA. 2012	8	0	13	0	12	0	1	0	0	0	0	0
c	Operasional PT BPD Jateng TB 2011-2012	18	15,300,407,190.00	38	10,464,667,860.00	33	3,981,412,813.00	5	6,483,255,047.00	0	0	0	0
Jumlah Th. 2012		44	17,635,554,991.00	91	12,452,559,471.00	80	5,969,304,424.00	11	6,483,255,047.00	0	0	0	0
11	Tahun Pemeriksaan 2011												

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	LKPD TA 2010	12	666,521,328.00	26	666,521,328.00	26	666,521,328.00	0	0	0	0	0	0
b	Belanja Propinsi Jateng TA 2010-2011	12	867,431,057.99	29	867,431,057.99	29	867,431,057.99	0	0	0	0	0	0
c	Kinerja RSUD dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah TA 2010-2011	12	0	21	0	21	-	0	0	0	0	0	0
d	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010	9	128,875,889.00	55	128,875,889.00	20	128,875,889.00	35	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2011	45	1,662,828,274.99	131	1,662,828,274.99	96	1,662,828,274.99	35	0	0	0	0	0
12	Tahun Pemeriksaan 2010												
a	LKPD TA 2009	11	976,170,781.05	20	976,170,781.05	19	6,380,201.00	1	969,790,580.05	0	0	0	0
b	PNPM Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	11	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	11,650,000.00	0	0	0	0	0	0
c	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi	5	3,491,494,657.46	11	245,732,688.99	11	245,732,688.99	0	0	0	0	0	0
d	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2009 dan 2010	14	488,547,225.00	27	462,877,225.00	26	461,947,225.00	1	930,000.00	0	0	0	0
e	Operasional BPD Jateng TA 2010	11	6,928,588,309.00	23	6,444,088,309.00	22	1,186,838,323.00	1	5,257,249,986.00	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2010	52	11,896,450,972.51	93	8,140,519,004.04	90	1,912,548,437.99	3	6,227,970,566.05	0	0	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Tahun Pemeriksaan 2009												
a	LKPD TA 2008	17	212,311,104.98	35	212,311,104.98	32	62,083,288.00	3	150,227,816.98	0	0	0	0
b	Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008	7	947,934,146.22	13	947,934,146.22	5	112,722,419.00	8	835,211,727.22	0	0	0	0
c	Depag 2007 dan 2008	19	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0
	Jumlah Tahun 2009	43	1,160,245,251.20	87	1,160,245,251.20	37	174,805,707.00	11	985,439,544.20	0	0	39	0
14	Tahun Pemeriksaan 2008												
a	LKPD TA 2007	20	21,385,027,425.48	40	20,710,817,809.00	40	20,710,817,809.00	0	0	0	0	0	0
b	Operasional BPD Jateng TB 2007 dan 2008	19	0	32	0-	32	0	0	0	0	0	0	0
c	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008	13	1,382,344,934.00	25	1,382,344,934.00	25	1,382,344,934.00	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahun 2008	52	22,767,372,359.48	97	22,093,162,743.00	97	22,093,162,743.00	0	0	0	0	0	0
15	Tahun Pemeriksaan 2007												
a	LKPD TA 2006	20	17,707,186.14	43	17,707,186.14	43	17,707,186.14	0	0	0	0	0	0
b	Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2007 dan Smt I 2007	3	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahun 2007	23	17,707,186.14	47	17,707,186.14	47	17,707,186.14	0	0	0	0	0	0
16	Tahun Pemeriksaan 2006												
a	LKPD TA 2005	19	2,929,728,157.00	28	2,475,133,157.00	28	2,475,133,157.00	0	0	0	0	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Perusda Provinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA 2005-2006	13	1,328,890,115.78	20	1,328,890,115.78	20	1,328,890,115.78	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahun 2006	32	4,258,618,272.78	48	3,804,023,272.78	48	3,804,023,272.78	0	0	0	0	0	0
17	Tahun Pemeriksaan 2005												
a	LKPD TA 2004	6	87,006,179.00	7	87,006,179.00	7	87,006,179.00	0	0	0	0	0	0
b	Kinerja BPD Jateng TB 2004	16	26,359,993.92	25	26,359,993.92	25	26,359,993.92	0	0	0	0	0	0
c	Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2004 dan 2005	8	5,771,394,781.61	12	5,771,394,781.61	12	5,771,394,781.61	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahun 2005	30	5,884,760,954.53	44	5,884,760,954.53	44	5,884,760,954.53	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	732	360,847,668,219.00	1,727	214,176,486,032.00	1,366	141,053,300,401.00	361	71,248,109,631.00	0	0	39	0

Semarang, Januari 2022
Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 S.D. 2021**


No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2021												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	332	537	1.486.274.812,00	171	274	646.582.108,00	42	72	233.116.000,00	119	191	606.576.704,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	351	575	0	137	190	0	48	122	0	166	263	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	64	105	0	25	48	0	10	17	0	29	40	0
	Jumlah Sub A	747	1.217	1.486.274.812,00	333	512	646.582.108,00	100	211	233.116.000,00	314	494	606576.704,00
B	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2020												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	311	440	1.504.235.041,96	280	406	1.166.758.846,96	12	14	17.881.025,00	19	20	319.595.170,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	389	465	0	336	401	0	21	30	0	32	34	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	75	114	0	74	113	0	1	1	0	0	0	0
	Jumlah Sub B	775	1.019	1.504.235.041,96	690	920	1.166.758.846,96	34	45	17.881.025,00	51	54	319.595.170,00
C	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2019												

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	810	1.052	4.322.690.131,30	734	965	3.994.483.869,63	52	67	286.039.271,67	24	20	42.166.990,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	528	771	0	494	694	0	17	26	0	17	51	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	192	230	0	182	218	0	7	9	0	3	3	0
	Jumlah Sub C	1.530	2.053	4.322.690.131,30	1.410	1.877	3.994.483.869,63	76	102	286.039.271,67	44	74	42.166.990,00
D	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2018												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	865	1.368	2.049.627.784,04	806	1.291	1.881.173.597,40	27	43	158.374.186,64	32	34	10.080.000,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	552	708	0	498	646	0	16	18	0	38	44	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	224	295	0	218	285	0	1	4	0	5	6	0
	Jumlah Sub D	1.641	2.371	2.049.627.784,04	1.522	2.222	1.881.173.597,40	44	65	158.374.186,64	75	84	10.080.000,00
E	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2017												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	707	1.142	1.594.602.531,09	698	1.122	1.562.737.349,64	9	20	31.865.181,45	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	294	425	0	286	407	0	8	18	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien)	167	222	0	166	220	0	1	2	0	0	0	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Ekonomis)												
	Jumlah Sub E	1.168	1.789	1.594.602.531,09	1.150	1.749	1.562.737.349,64	18	40	31.865.181,45	0	0	0
F	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2016												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.241	1.720	13.641.333.386,06	1.207	1.651	13.362.545.932,62	34	69	278.787.453,44	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	564	718	6.495.000,00	548	697	6.495.000,00	16	21	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	310	426	0	302	406	0	8	20	0	0	0	0
	Jumlah Sub F	2.115	2.864	13.647.828.386,06	2.057	2.754	13.369.040.932,62	58	110	278.787.453,44	0	0	0
G	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2015												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.212	1.768	5.913.404.678,10	1.182	1.706	4.128.339.480,72	29	61	1.785.065.197,38	1	1	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	677	847	0	666	829	0	11	18	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	371	485	0	367	479	0	4	6	0	0	0	0
	Jumlah Sub G	2.260	3.100	5.913.404.678,10	2.215	3.014	4.128.339.480,72	44	85	1.785.065.197,38	1	1	0
H	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2014												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	930	1.379	3.314.912.103,62	885	1.287	2.614.482.462,30	35	78	672.395.263,32	10	14	28.034.378,00

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	475	607	0	466	596	0	3	4	0	6	7	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	413	544	0	407	536	0	2	4	0	4	4	0
	Jumlah Sub H	1.818	2.530	3.314.912.103,62	1.758	2.419	2.614.482.462,30	40	86	672.395.263,32	20	25	28.034.378,00
I	SALDO REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2007 S.D TA 2013												
	Sub Jumlah I	13.466	15.936	305.513.433.262,68	13.312	15.760	49.390.770.664,40	129	143	256.122.662.598,28	25	33	0
	Jumlah A s.d. I	25.520	32.879	339.347.008.730,85	24.447	31.227	78.754.369.311,67	543	887	259.586.186.177,18	530	765	1.006.453.242,00

Semarang, Januari 2022
Pt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus


DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011 S.D. 2021**

No	HP SEMESTERAN Kelompok/ Kode Temuan	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
		Jml Tem uan	Jml Sara n	Nilai (Rp)	Jml Tem uan	Jml Sara n	Nilai (Rp)	Jml Tem uan	Jml Sara n	Nilai (Rp)	Jml Tem uan	Jml Sar an	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	HP TAHUN 2021													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	2	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	4	0,00	
	Sub Jumlah A	2	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	4	0,00	
B	HP TAHUN 2020													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	3	3	0,00	3	3	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah B	3	3	0,00	3	3	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
C	HP TAHUN 2019													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah C	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
D	HP TAHUN 2018													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah D	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
E	HP TAHUN 2017													
	Tidak Mencantumkan	20	29	0,00	20	29	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kode temuan													
	Sub Jumlah E	20	29	0,00	20	29		0	0	0,00	0	0	0,00	
F	HP TAHUN 2016													
	Tidak mencantumkan kode temuan	15	20	0,00	15	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah F	15	20	0.00	15	20	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
G	HP TAHUN 2015													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah G	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
H	HP TAHUN 2014													
	Tidak mencantumkan kode temuan	21	31	0,00	21	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah H	21	31	0,00	21	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
I	HP TAHUN 2013													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah I	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
J	HP Tahun 2012													
	Tidak mencantumkan kode temuan	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah J	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
K	HP Tahun 2011													
	Tidak mencantumkan	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kode temuan													
	Sub Jumlah K	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Jumlah Total A-K	178	253	259.081.000,00	176	249	259.081.000,00	0	0	0,00	2	4	0,00	

Semarang, Januari 2022
Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

**REKAPITULASI HASIL PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2021**

Asal Pengaduan								Status Tindak Lanjut			Jumlah
Surat Aduan	Laporgub	Media Sosial	Limpahan Irjen	Limpahan Setneg	Limpahan KPK	Limpahan Menpan	Limpahan Gubernur	S	D	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	42	13	3	3	0	1	4	43	41	3	87

Semarang, Januari 2022

**Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus**

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002